

POLARISASI GENDER DI MEDIA SOSIAL

Khairunnisa Pgustika

Bob Andrian

Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam
Dosen Institut Agama Islam Negeri Pontianak
kpgustika03@gmail.com, bobandriansbs@gmail.com

Abstract

Gender polarization on social media refers to a situation where social media users strongly divide over gender-related opinions, views and issues. Social media has become an important platform for individuals to talk about gender issues, including gender equality, women's rights, traditional gender roles, and other related topics. Polarity in online conversations about gender issues can reflect the different views, experiences and values that exist in society. Gender polarization can also occur in discussions about gender stereotypes. Social media provides a space for users to discuss traditional stereotypes about certain gender roles. Some people may be in favor of abolishing these stereotypes, while others may maintain them as part of their culture or beliefs. This kind of debate can create divisions among social media users with different viewpoints.

Keywords: Polarization, Gender, Social Media.

Abstrak

Polarisasi gender di media sosial merujuk pada situasi di mana pengguna media sosial secara tegas membagi-bagi pendapat, pandangan, dan isu-isu yang berkaitan dengan gender. Media sosial telah menjadi platform penting bagi individu untuk berbicara tentang isu-isu gender, termasuk kesetaraan gender, hak-hak perempuan, peran gender tradisional, dan topik-topik terkait lainnya. Polaritas dalam percakapan online tentang isu-isu gender dapat mencerminkan perbedaan pandangan, pengalaman, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Polarisasi gender juga bisa terjadi dalam diskusi mengenai stereotip gender. Media sosial memberikan ruang bagi pengguna untuk membahas stereotip tradisional tentang peran-peran gender tertentu. Beberapa orang mungkin mendukung penghapusan stereotip ini, sementara yang lain mungkin mempertahankannya sebagai bagian dari budaya atau keyakinan mereka. Perdebatan semacam ini dapat menciptakan perpecahan di antara pengguna media sosial dengan sudut pandang yang berbeda.

Kata Kunci: Polarisasi, Gender, Media Sosial.

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, media sosial telah secara fundamental mengubah cara orang berkomunikasi. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok menyediakan ruang bagi miliaran pengguna di seluruh dunia untuk terhubung, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam debat publik. Aspek penting yang muncul dari penggunaan media sosial adalah polarisasi gender, yang mengacu pada perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat yang kuat tentang isu-isu terkait gender.

Polarisasi gender di media sosial mencerminkan kompleksitas dan keragaman masyarakat kita. Pengguna media sosial menggunakan platform ini sebagai alat untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang kesetaraan gender, peran tradisional, hak-hak perempuan, stereotip gender, dan isu-isu terkait identitas gender dan seksualitas. Meskipun polarisasi itu sendiri bukanlah fenomena baru, media sosial telah mempercepat dan memperluas dampaknya dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pembahasan isu gender di media sosial seringkali mencerminkan perbedaan pandangan, pengalaman, dan nilai yang mendalam dari individu dan kelompok. Kelompok-kelompok yang berpandangan feminis dan kelompok-kelompok yang menentang feminisme seringkali menjadi perbincangan hangat dan bergairah di media sosial. Selain itu, pertanyaan tentang identitas gender dan seksualitas juga menjadi fokus diskusi dan perdebatan di ruang digital ini.

Penting untuk memahami dinamika polarisasi gender di media sosial, karena dampaknya dapat merembes ke kehidupan nyata. Polarisasi ini dapat memengaruhi persepsi, sikap, dan tindakan individu serta memperdalam perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mendalam dan analisis kritis diperlukan untuk memahami akar penyebab, efek, dan konsekuensi dari polarisasi gender di media sosial.

B. KONSEPTUALISASI POLARISASI GENDER

Polarisasi gender merujuk pada pembagian, perpecahan, atau perbedaan yang tajam dalam pandangan, persepsi, dan sikap terkait isu-isu gender dalam suatu masyarakat. Polarisasi ini muncul ketika individu-individu atau kelompok-kelompok memiliki pandangan yang berlawanan atau bertentangan tentang peran, identitas, hak, dan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Polarisasi gender melibatkan perselisihan dan ketegangan dalam pandangan dan pemahaman tentang isu-isu gender, termasuk kesetaraan gender,

feminisme, peran gender tradisional, hak-hak reproduksi, pelecehan seksual, kesenjangan upah, dan banyak lagi. Perbedaan pendapat ini dapat mencerminkan perbedaan budaya, nilai-nilai, agama, pengalaman pribadi, dan faktor-faktor sosial lainnya.¹

Polarisasi gender dapat muncul di berbagai arena, termasuk diskusi publik, media, politik, pendidikan, dan bahkan dalam lingkungan pribadi dan keluarga. Hal ini dapat memperkuat pembagian antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan serupa, menciptakan "kubu" atau "gelembung" di mana individu cenderung berinteraksi dengan orang-orang yang sependapat. Polarisasi gender dapat memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat. Pertama, polarisasi dapat memperdalam ketidakpahaman dan ketidakmengertian antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan, menghambat dialog konstruktif dan kolaborasi. Kedua, polarisasi gender dapat memperkuat stereotip, prasangka, dan diskriminasi gender yang ada, menghambat perubahan sosial menuju kesetaraan gender. Ketiga, polarisasi dapat memperburuk ketegangan sosial, permusuhan, dan bahkan kekerasan antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan.

Penting untuk mencari cara-cara untuk mengelola dan mengatasi polarisasi gender. Ini melibatkan upaya untuk memahami dan menghargai sudut pandang yang berbeda, mendengarkan dengan empati, mempromosikan dialog terbuka, dan membangun kesadaran terhadap isu-isu gender. Kolaborasi, edukasi, dan advokasi yang inklusif dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi polarisasi, memperluas pemahaman, dan memperjuangkan kesetaraan gender yang lebih baik.²

Dalam media sosial, polarisasi gender sering kali diperkuat oleh algoritma dan filter gelembung (echo chamber) yang mengarahkan pengguna untuk terlibat dalam konten yang sesuai dengan pandangan mereka yang sudah ada. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana individu cenderung berinteraksi dengan orang-orang yang sependapat, sementara pandangan yang berbeda menjadi terisolasi atau bahkan diabaikan. Dalam konteks ini, polarisasi gender dapat menjadi lebih tajam dan perpecahan semakin mendalam.

Polarisasi gender di media sosial memiliki dampak yang signifikan. Pertama, polarisasi dapat memperdalam perpecahan dan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Ini dapat mengarah pada

¹ Hancock, A.M., & Pua, J. (2016). *Gender, Sexuality, and Social Media*. Routledge.

² Davies, S.E., & True, J. (Eds.). (2018). *The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security*. Oxford University Press

permusuhan, permusuhan, dan retorika yang merendahkan yang memperburuk komunikasi dan pemahaman antar kelompok. Kedua, polarisasi dapat membatasi pembentukan pemahaman yang inklusif dan kerjasama dalam mengatasi isu-isu gender yang kompleks. Ketiga, polarisasi juga dapat mempengaruhi individu secara psikologis, meningkatkan ketegangan, stres, dan kecemasan akibat tekanan dari diskusi yang intens dan bermusuhan.

Namun, penting untuk diingat bahwa polarisasi gender di media sosial juga dapat mendorong dialog, kesadaran, dan gerakan sosial yang progresif. Media sosial memberikan platform bagi individu untuk menyuarakan pengalaman mereka, membangun solidaritas, dan memobilisasi perubahan positif. Dalam beberapa kasus, polarisasi dapat menjadi titik awal bagi transformasi sosial yang lebih luas.³

C. METODE PENELITIAN

Artikel ini, analisis dilakukan dengan komprehensif terhadap fenomena polarisasi gender di media sosial. Perbedaan pendapat, pandangan, dan argumen yang muncul akan dieksplorasi dalam percakapan online seputar isu-isu gender. Kami akan melihat implikasi polarisasi ini dalam masyarakat dan bagaimana hal itu memengaruhi diskusi publik, kesetaraan gender, dan perjuangan untuk hak-hak perempuan. Selain itu, kami juga akan menjelajahi upaya yang dapat dilakukan untuk mempromosikan dialog yang inklusif dan membangun pemahaman yang lebih baik di tengah polarisasi gender di media sosial.

D. PEMBAHASAN

FEMINISME DI DUNIA

Bayangkan dunia tanpa feminisme, apa jadinya? Dunia yang tidak memperbolehkan perempuan mengenyam pendidikan tinggi, tidak memperbolehkan perempuan memegang jabatan politik atau berkarier bahkan memilih sikap hidup untuk menikah atau tidak menikah, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, dan seterusnya. Walaupun hasil kerja para feminis telah banyak memajukan kehidupan perempuan, keberadaan para feminis tidak selalu disambut dengan tangan terbuka. Feminisme seringkali digambarkan secara buruk oleh berbagai macam kelompok. Di tingkat politik, feminisme dianggap mengambil porsi kekuasaan laki-laki. Argumentasi kuota 30 persen bagi perempuan di politik tidak dilihat sebagai suatu tindakan

³ Sunar to, "Gender Polarization and Women's Political Empowerment in Indonesia: The Role of Social Media," *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(2), 2019.

affirmative action yang berguna bagi kelompok minoritas (tidak berdaya) manapun.

Di tingkat budaya, segala efek negatif kemajuan budaya kontemporer dianggap bersumber pada feminisme. Misalnya, adanya kebebasan berhubungan seksual, perceraian, peningkatan jumlah anak yang narkoba, pakaian yang minim/seksi, dan lain-lain. Bahkan, para feminis cenderung dianggap kelompok pemarah yang mempertanyakan dan menggugat segala hal. Namun, tidak ada yang pernah bertanya mengapa para feminis begitu marah dengan keadaan yang tidak adil? Tidakkah wajar bila seseorang merasa marah bila diperlakukan tidak adil?

Bagaimana mengukur ketidakadilan yang dialami perempuan? Dari segi politik, representasi perempuan di Indonesia termasuk yang paling terendah peringkat 74 rata-rata 8 persen (dari 500 anggota DPR hanya 40 orang perempuan). Representasi perempuan Indonesia di tingkat politik masih lebih rendah dari negara-negara Afrika, seperti Zimbabwe, Burkina Faso, Zambia, dan negara - negara Amerika Latin, seperti Venezuela dan El Salvador. Pada partisipasi perempuan dalam kabinet, juga menunjukkan peningkatan yang lambat.⁴

Sebelum kemerdekaan, pendidikan hanya dinikmati oleh kaum perempuan dari kalangan bangsawan. Seperti dikemukakan oleh Stuers (2008:63), pada masa kolonial Belanda hanya ada beberapa orang perempuan, khususnya dari kelompok masyarakat bangsawan, yang telah mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan formal, sementara kelompok lainnya hanya mendapat pendidikan nonformal dan buta huruf. Hal tersebut didasarkan pada pendapat N. Dwijo Sewojo—seorang instruktur sekolah pendidikan guru di Yogyakarta—yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa pada masa kolonial Belanda dibedakan menjadi empat kelas dengan status perempuan yang berbeda-beda, yaitu golongan miskin, golongan menengah, golongan santri, dan golongan priyayi. Status para perempuan dari empat golongan tersebut digambarkan sebagai berikut.

Pertama, para perempuan golongan miskin tidak mendapat pendidikan. Mereka belajar melakukan pekerjaan di sawah dan menjual hasilnya. Kadang-kadang mereka belajar menjahit, hidup sangat keras, tetapi mereka cukup bebas. Kedua, para perempuan golongan menengah (cukup mampu) juga tidak bersekolah dan mereka belajar melakukan pekerjaan rumah. Mereka biasanya menikah pada usia antara 12—15 tahun. Setelah menikah mereka membantu

⁴ Gadis Arivia, *"Feminisme: Sebuah Kata Hati,"* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.

suaminya di sawah atau berdagang. Mereka diperlakukan dengan baik oleh suaminya karena mereka sebenarnya dapat menafkahi kehidupannya sendiri. Ketiga, para perempuan golongan santri tidak bersekolah, tetapi mereka mendapat pelajaran agama di rumah. Mereka biasanya mulai menikah sejak usia lima belas tahun. Para perempuan golongan ini begitu dihargai suaminya karena secara umum mereka memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan para perempuan di golongan sebelumnya. Keempat, beberapa perempuan dari golongan (priyayi) bangsawan belajar di sekolah dasar. Namun, sejak usia 12 tahun mereka dipingit dan hanya melakukan sedikit pekerjaan karena telah memiliki banyak pembantu. Setelah memasuki usia 15 atau 16 tahun mereka menikah dan kembali melanjutkan kehidupan mereka yang terkekang dan tanpa kesibukan (Stuers, 2008:63 – 64).⁵

Isu diskriminasi terhadap perempuan telah menimbulkan keprihatinan sejumlah intelektual yang kemudian membahasnya dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan di Meksiko tahun 1975, yang juga dihadiri oleh wakil gerakan perempuan Indonesia. Dalam konferensi tersebut disepakati untuk menyusun naskah tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan membahasnya dalam sidang umum PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa) (Sadli, 2010:34). Hasil dari pembahasan tersebut adalah menetapkan berlakunya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan, CEDAW) yang oleh pemerintah Indonesia diratifikasi dengan UU No.7/1984 tentang Pengesahan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Konvensi ini selanjutnya disingkat menjadi Konvensi Wanita dan sekarang disebut CEDAW (Convention on the Elimination of All Types of Discrimination Against Women) (Sadli, 2010:34).

Dari uraian tersebut tampak bahwa isu pentingnya keterdidikan perempuan bukan hanya merupakan isu nasional, tetapi juga merupakan isu internasional. Hal ini berarti bahwa keterdidikan perempuan merupakan persoalan bersama sejumlah negara di dunia yang memerlukan solusi untuk pencapaiannya. Isu tersebut bahkan telah menjadi kegelisahan para feminis liberal sejak abad ke-18 seperti Mary Wollstonecraft di Eropa yang menginginkan adanya kesetaraan kualitas pendidikan antara perempuan dengan laki-laki. Dengan tegas Wollstonecraft mengemukakan bahwa masyarakat wajib memberikan pendidikan kepada perempuan, seperti juga kepada laki-laki, karena semua manusia berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kapasitas nalar dan moralnya (Tong,

⁵ Wiyatmi, "Menjadi Perempuan Terdidik: Novel Indonesia, dan Feminisme," Yogyakarta: UNY Press, 2013.

2006:21). Gagasan tersebut disampaikan oleh Wollstonecraft karena dia mengamati kondisi perempuan borjuis di Eropa yang sudah menikah abad ke-18 harus tinggal di rumah dan tidak produktif. Kedaan tersebut terutama terjadi setelah era kapitalisme industri yang mulai menarik tenaga kerja laki-laki ke luar rumah dan kemudian memasuki ruang kerja publik, sementara perempuan harus tinggal di rumah.

Adapun hal - hal yang terkait dengan feminisme di media sosial yaitu :

1. Ruang untuk Pengorganisasian dan Mobilisasi: Media sosial memberikan platform yang kuat bagi perempuan dan pendukung feminisme untuk mengorganisir, berbagi informasi, dan berkoordinasi dalam kampanye dan aksi-aksi perubahan sosial. Gerakan feminis di media sosial telah menghasilkan berbagai kampanye viral, petisi daring, dan tagar (*hashtag*) yang membantu memperluas jangkauan isu-isu gender dan mendapatkan dukungan yang lebih luas.
2. Pengungkapan Pengalaman dan Solidaritas: Media sosial memberikan ruang bagi perempuan untuk berbagi pengalaman pribadi mereka terkait pelecehan, diskriminasi, dan ketidakadilan gender. Dengan berbagi cerita dan pengalaman mereka, perempuan dapat membangun solidaritas, menunjukkan betapa umumnya masalah tersebut, dan merangsang perubahan sosial yang lebih luas.
3. Menantang Stereotip dan Norma-Norma Gender: Media sosial memainkan peran penting dalam menantang stereotip gender yang ada dan norma-norma yang tidak adil. Melalui gambar, teks, dan video yang dibagikan di platform tersebut, perempuan dan pendukung feminisme dapat menghadapi representasi yang sempit dan merangsang pemikiran kritis terhadap peran gender yang terbatas.
4. Menggalang Dukungan dan Kesadaran: Media sosial memungkinkan perempuan dan pendukung feminisme untuk menggalang dukungan dan kesadaran terhadap isu-isu gender melalui kampanye online, diskusi panel daring, dan pertukaran ide. Ini membantu memperluas jangkauan pesan feminisme, mencapai audiens yang lebih luas, dan mengubah pandangan serta sikap terkait kesetaraan gender.
5. Kritik terhadap Seksisme dalam Media: Media sosial memberikan ruang bagi perempuan dan pendukung feminisme untuk secara terbuka dan langsung mengkritik seksisme dalam media massa. Diskusi dan kampanye online sering kali menyoroti penggambaran yang merendahkan, objektifikasi, dan diskriminatif terhadap perempuan dalam iklan, film, musik, dan media lainnya.

Melalui media sosial, gerakan feminis telah mampu mencapai audiens yang lebih luas, mengubah narasi publik tentang isu-isu gender, dan memobilisasi tindakan kolektif untuk mencapai perubahan sosial. Meskipun terdapat tantangan dan ancaman seperti troll dan pelecehan daring, media sosial tetap menjadi alat yang kuat dalam perjuangan feminisme dan memperluas ruang partisipasi perempuan dalam percakapan publik.

STEREOTIP GENDER

Stereotip gender adalah sikap atau keyakinan yang dianut seseorang mengenai jenis kelamin tertentu, menganggap satu jenis kelamin kurang kompeten atau lebih rendah dari yang lain. Sesuai dengan literatur istilah "stereotype gender" dapat memberikan informasi (positif atau negatif) mengenai pandangan pemilih terhadap calon. Dengan demikian, seorang individu dengan stereotip gender awal dapat memperbarui "preferensi dasar" ini jika dia memiliki pengalaman baru dengan kandidat dan pejabat terpilih yang mengubah keyakinan jangka panjang individu tentang kandidat perempuan. Konsep ini sejalan dengan apa yang sering disebut ekonom sebagai diskriminasi statistik, perbedaannya adalah bahwa dalam literatur ekonomi, preferensi dan keyakinan diperlakukan secara terpisah.⁶

Stereotip feminin mencirikan perempuan sebagai orang yang hangat, penuh kasih, memelihara, dan sensitif; dan karakteristik ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan individu dari para pemimpin politik (Koenig dkk. 2011).⁷ Ketidaksiharian antara stereotip feminin dan peran kepemimpinan mengarah pada harapan stereotip ini memiliki efek negatif pada kandidat perempuan.⁸ Namun, penelitian yang ada menyajikan serangkaian kesimpulan yang saling bertentangan tentang apakah dan bagaimana stereotip feminin memengaruhi kandidat perempuan. Satu set temuan berpendapat bahwa keberpihakan kandidat melebihi pengaruh stereotip feminin tentang bagaimana individu memandang kandidat perempuan (Dolan 2014). Pendekatan lain berpendapat bahwa ketergantungan stereotip feminin tergantung pada apakah kandidat perempuan mengadopsi taktik kampanye yang menegaskan atau bertentangan dengan stereotip feminin. Kesimpulan yang bertentangan ini menunjukkan bahwa proses

⁶ Paulo Ar vate, et al., "Gender Stereotypes in Politics: What Changes When a Woman Becomes the Local Political Leader?," *Wor kin g paper DE FEVEREIRO DE 2014*, 2014.

⁷ Ann e M. Koen ig, et al., "Are Leader Stereotypes Masculine? A Meta -Analysis of Three Research Paradigms," *Psychological Bulletin*, 137 (4), 2011, h. 616 -642.

⁸ Mir ya R. Holman , "Sex, Stereotypes and Security: An Experimental Study of the Effect of Crises on Assessments of Gender an d Leadership," *Journal of Women , Politics & Policy*, 32 (3), 2011, h . 173 -192.

stereotip sangat bersyarat, dan individu mungkin berbeda dalam cara mereka menggunakan alat ini.

Penelitian sebelumnya mengidentifikasi beberapa karakteristik individu yang memengaruhi dukungan elektoral untuk kandidat perempuan termasuk jenis kelamin, keberpihakan, dan tempat tinggal individu. Misalnya, Demokrat lebih cenderung memilih kandidat perempuan dari Partai Demokrat dan Republik. Pengaruh afinitas gender membuat perempuan lebih mungkin mendukung kandidat perempuan. Selain itu, mereka yang tinggal di negara bagian yang lebih konservatif atau negara bagian dengan sedikit perempuan politik yang terlihat kurang mendukung kandidat perempuan. Studi-studi ini umumnya berfokus pada pengukuran dukungan suara untuk kandidat perempuan, dan tidak selalu mengukur bagaimana stereotip feminin memengaruhi pola dukungan ini.

Istilah gender melibatkan peran laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat dengan sendirinya memunculkan isu-isu gender di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi dan ketenagakerjaan. Isu gender adalah suatu ketidakadilan terhadap laki-laki dan perempuan yang bersifat sistemik, dirasakan oleh sebagian besar orang di banyak tempat, mendesak untuk diselesaikan dan memiliki daya ungkit kepada isu lain apabila isu tersebut diselesaikan.

Isu-isu tentang penyeteraan gender memang selalu menjadi distorsi (perdebatan) di kalangan akademisi dan non-akademisi dari zaman ke zaman. Permasalahan ini akan terus diangkat sepanjang kaum perempuan benar-benar merasakan hak-haknya dan tidak ada bias gender. Masih terbayang di benak kita pada sebuah statemen yang mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk ke dua, artinya adalah ada signifikansi antara laki-laki dan perempuan, posisi perempuan tidak memiliki hak sebagaimana laki-laki. Hal ini berimplikasi pada sikap merendahkan perempuan yang dianggap sebagai makhluk nomor dua yang tidak boleh berpolitik dan tidak boleh menyuarakan hak-haknya. Seperti di dalam istilah klasik menyebutkan tugas perempuan tidak boleh lebih dari sekedar di dapur, sumur, dan kasur.

Dominasi peran laki-laki dalam sektor publik, sementara peran perempuan terbatas dalam sektor domestik adalah konstruksi sosial dan dengan demikian harus direkonstruksi menegakkan keadilan gender. Maka akan terlihat sedikit peran perempuan di wilayah publik, misalnya menjadi politikus, anggota DPR, menteri, bahkan seorang presiden. Sebaliknya perempuan akan lebih banyak terlihat di wilayah domestik. Tentunya

fenomena seperti ini harus cepat dicarikan solusi karena fenomena seperti ini hanya akan melanggengkan perspektif patriarki yang akan berimplikasi pada semakin termarginalkannya sosok perempuan.

Huddy dan Terkildsen mendefinisikan "stereotip gender politik" sebagai "penganggapan berbasis gender dari sifat, perilaku, atau keyakinan politik yang berbeda untuk politisi pria dan perempuan" (1993, 120). Meskipun banyak stereotip gender mencerminkan keyakinan tentang tipikal pria dan perempuan dalam masyarakat, yang lain muncul dari ranah politik. Dengan demikian, stereotip gender politik dapat mewakili subtype stereotip gender yang berbeda.

Stereotip gender pemilih menyangkut ciri - ciri kepribadian, kompetensi isu, dan posisi isu. Misalnya, pemilih percaya bahwa politisi perempuan memiliki lebih banyak sifat feminin", seperti kehangatan dan kasih sayang, dan lebih sedikit sifat "maskulin", seperti kepemimpinan dan kekuatan. Politisi perempuan dianggap lebih mampu menangani isu-isu "kasih sayang", seperti pendidikan dan kemiskinan, serta isu-isu hak-hak perempuan; politisi laki-laki dianggap lebih mampu menangani isu-isu seperti kejahatan, pertahanan, dan kebijakan luar negeri. Kandidat perempuan juga diyakini lebih liberal, demokrat, dan feminis daripada kandidat laki-laki.⁹

Para ahli telah meneliti kondisi di mana pemilih mengandalkan stereotip gender daripada informasi individu tentang kandidat. Stereotip dianggap lebih berpengaruh tanpa adanya informasi lain: semakin sedikit pemilih tahu tentang seorang kandidat, semakin besar kemungkinan mereka menggunakan gender kandidat untuk membuat kesimpulan. Namun, bahkan jika pemilih memiliki banyak informasi tentang kandidat, stereotip mungkin masih menjadi konsekuensi, karena pemilih dapat mengandalkan informasi individual dan stereotip dalam evaluasi mereka (Bodenhausen, Macrae dan Sherman, 1999), Stereotip dapat digunakan untuk memprediksi perilaku masa depan dan dapat memengaruhi pemrosesan informasi. Selain itu, karena stereotip gender bersifat preskriptif, penyimpangan dari perilaku stereotip cenderung dihukum (Glick dan Fiske 1990). Misalnya, pemimpin perempuan yang mengadopsi gaya kepemimpinan maskulin mungkin dievaluasi lebih keras daripada pria.

Stereotip gender di media sosial mengacu pada pandangan yang dangkal, sederhana, dan sering kali tidak akurat tentang peran, karakteristik, dan perilaku yang diatributkan kepada perempuan dan laki-laki. Stereotip gender dalam konteks media sosial dapat mempengaruhi persepsi, sikap, dan

⁹ Lawless, "Women, War and Winning Elections," H. 479-490.

perilaku individu terhadap gender. Media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan dan memperkuat stereotip gender. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pembahasan stereotip gender di media sosial:

1. Representasi yang Tergeneralisasi: Media sosial sering kali menggunakan representasi yang tergeneralisasi mengenai perempuan dan laki-laki. Misalnya, perempuan digambarkan sebagai individu yang lemah, emosional, atau fokus pada penampilan fisik, sementara laki-laki digambarkan sebagai kuat, agresif, atau berorientasi pada pencapaian karir. Stereotip semacam ini dapat mempersempit pandangan dan mereduksi keberagaman dan kompleksitas individu dalam masyarakat.
2. Pembingkai yang Menyimpang: Media sosial seringkali membingkai isu-isu gender dengan cara yang menyimpang, memperkuat stereotip yang ada. Misalnya, dalam pemberitaan tentang perempuan, fokus sering kali ditujukan pada penampilan fisik, kehidupan pribadi, atau hubungan romantis, sementara kemampuan, pencapaian, dan kontribusi mereka sering diabaikan. Hal ini dapat mengurangi penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam berbagai bidang dan melekatkan nilai-nilai yang tidak seimbang pada peran dan identitas gender.
3. Body Shaming dan Objektifikasi: Media sosial sering kali menjadi ruang untuk mempromosikan *body shaming* (menghina penampilan fisik seseorang) dan objektifikasi (mengurangi seseorang menjadi objek seksual). Perempuan sering menjadi sasaran utama dalam hal ini, dengan norma-norma kecantikan yang sempit dan berbagai tekanan untuk memenuhi standar tertentu. Objektifikasi dan *body shaming* dapat berdampak negatif pada citra diri, kepercayaan diri, dan kesehatan mental individu.
4. Peran Gender yang Tertentu: Media sosial juga sering mendorong persepsi peran gender yang kaku dan terbatas. Misalnya, perempuan seringkali digambarkan sebagai ibu, pengurus rumah tangga, atau obyek kesenangan, sementara laki-laki digambarkan sebagai pemburu, pemimpin, atau pahlawan. Stereotip semacam ini dapat membatasi pilihan dan aspirasi individu, serta memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi antara perempuan dan laki-laki.

Penting untuk menyadari bahwa stereotip gender di media sosial tidak mewakili keberagaman dan kompleksitas individu dalam masyarakat. Penting bagi pengguna media sosial untuk menjadi kritis terhadap pesan yang mereka terima, serta mempromosikan representasi yang lebih inklusif dan akurat tentang perempuan dan laki-laki.

E. KESIMPULAN

Polarisasi gender di media sosial merupakan fenomena kompleks yang mencakup berbagai aspek seperti feminisme, stereotip gender, dan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, feminisme telah menjadi gerakan yang kuat di jejaring sosial, mengadvokasi kesetaraan, mengkritik ketidakadilan gender, dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Media sosial menyediakan ruang bagi perempuan dan pendukung feminis untuk berorganisasi, berbagi pengalaman, menantang stereotip gender dan mengumpulkan dukungan dan kesadaran tentang isu gender. Di sisi lain, media sosial juga kerap menjadi tempat terciptanya stereotipe gender yang merugikan perempuan. Stereotip gender di media sosial dapat memperkuat peran gender yang kaku dan membatasi perempuan pada area tertentu. Ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan diri wanita dan menciptakan tekanan sosial yang tidak sehat.

Selain itu, kekerasan terhadap perempuan menjadi isu utama terkait polarisasi gender di media sosial. Kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai bentuk kekerasan yang secara khusus menasar perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, dan kekerasan berbasis gender lainnya. Media sosial dapat menjadi ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik melalui pelecehan online, penyebaran pornografi balas dendam atau penyebaran serangan verbal. Mengatasi polarisasi gender di media sosial akan membutuhkan upaya bersama dari individu, keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Contohnya termasuk pendidikan dan kesadaran publik tentang hak-hak perempuan, pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan, penegakan hukum yang ketat, akses ke layanan kesehatan dan dukungan kesehatan mental, serta perubahan norma dan budaya yang merendahkan perempuan. Dalam perjuangan melawan polarisasi gender di media sosial, penting untuk memperdalam pemahaman tentang isu-isu gender, menantang stereotip berbahaya, dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang, tanpa memandang gender. Hanya dengan bekerja sama dan bekerja sama kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan aman untuk semua.

F. REFERENCES

- Arivia, Gadis. (2006). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Dr. Wiyatmi, M.Hum. (2013). *Menjadi Perempuan Terdidik: Novel Indonesia, dan Feminisme*. Yogyakarta: UNY Press.
- Arvate, Paulo. (2014). *Gender Stereotypes in Politics: What Changes When a Woman Becomes the Local Political Leader?*. Working paper DE FEVEREIRO DE 2014.
- Davies, S.E., & True, J. (Eds.). (2018). *The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security*. Oxford University Press.
- Feryna Nur Rosyidah, Hadiyanto A. Rachim, Pitoyo. (2022). *Social Media Trap: Remaja dan Kekerasan Berbasis Gender Online*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi.
- Hancock, A.M., & Pua, J. (2016). *Gender, Sexuality, and Social Media*. Routledge.
- Lawless, L. Jennifer. (2004). *Women, War and Winning Elections*. Political Research Quarterly: Sage Publications, Inc.
- M. Koenig, Anne. (2011). *Are Leader Stereotypes Masculine? A Meta-Analysis of Three Research Paradigms*. Psychological Bulletin.
- R. Holman, Mirya. (2011). *Sex, Stereotypes and Security: An Experimental Study of the Effect of Crises on Assessments of Gender and Leadership*. Journal of Women, Politics & Policy.
- Role of Social Media*, Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication.
- Rosyidah, F. N., & Nurdin, M. F. (2018). *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi.
- Sadli, Sapparinah. (1977). *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sunarto. (2018). *Gender Polarization and Women's Political Empowerment in Indonesia: The*